

## ABSTRAK

Pengaturan mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Berkenaan dengan larangan PNS untuk aktif dalam partai politik menjadi permasalahan sentral di dalam undang-undang ini. Hal itu dapat ditemukan di dalam ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat (3) yang menyatakan bahwa PNS yang mengikuti pemilihan misalnya Pemilukada diwajibkan untuk mengundurkan diri dari profesinya sebagai PNS, ketentuan demikian diatur guna mewujudkan cita-cita UU ASN agar PNS terbebas dari intervensi partai politik karena mekanisme pemilihan yang berlaku sebelumnya mengharuskan calon peserta pemilihan untuk menempuh mekanisme partai politik. Selain itu ketentuan kedua pasal di atas merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf c.

Perkembangan sistem pemilihan kepala daerah yang ada di Indonesia, khususnya mengenai peserta pemilihan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, salah satunya adalah calon independen yang bukan berasal dari partai politik dan/atau gabungan partai politik melainkan calon yang didukung oleh mayoritas masyarakat yang ada di suatu daerah.

Perubahan yang terjadi di dalam sistem pemilihan kepala daerah ini, hendaknya mengecualikan penerapan Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat (3) UU ASN terhadap PNS yang mengikuti Pemilukada melalui calon independen. Kedua pasal UU ASN ini telah dilakukan pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi. Hakim Konstitusi melalui PMK Nomor 41/PUU-XII/2014, tidak membatalkan keberlakuan kedua pasal tersebut melainkan hanya mengubah waktu pengunduran diri PNS ketika mengikuti pemilukada.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Penyusunan tesis ini difokuskan untuk mengetahui analisis *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim di dalam PMK Nomor 41/PUU-XII/2014. Tujuan akhir dari analisis putusan hakim tersebut adalah untuk menelaah kerugian-kerugian yang akan ditimbulkan dari penerapan kedua pasal UU ASN terhadap sebagian hak PNS sehingga dapat ditelaah mengenai perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap profesi PNS yang mengikuti pemilukada melalui calon independen.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa analisis *ratio decidendi* hakim mengenai kewajiban pengunduran diri PNS yang mengikuti pemilukada tanpa mekanisme partai politik telah menimbulkan diskriminasi. Perlindungan hukum hak-hak PNS yang mengikuti pemilukada melalui calon independen harus diberikan oleh negara karena yang bersangkutan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan, karena itu bagi PNS tersebut mestinya hanya diberhentikan sementara dari profesinya atau diberikan cuti di luar tanggungan negara.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pegawai Negeri Sipil, Pemilukada, Calon Perseorangan (*Independen*).

**ABSTRACT**

Civil Servants (PNS) is regulated in Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus (UU ASN). With regard to the ban on civil servants to be active in politics become a central issue in this legislation. It can be found in the provisions of Article 119 and Article 123 Paragraph (3) which states that civil servants who follow the election, obliged to resign from his profession as a civil servant, such a provision is set in order to realize the ideals of the Act ASN so that civil servants free of intervening parties politics election mechanism applicable for previous elections require candidates to take the mechanism of political parties. Besides the two articles above provision is an elaboration of the provisions of Article 87 Paragraph (4) c.

The development system is the local elections in Indonesia, particularly regarding the participants election allowed by Act No. 8 of 2015 on the Election of governors, regents, and mayors, one of whom is an independent candidate who did not come from a political party and/or coalition of political parties but the candidate supported by the majority of people in an area.

Changes that occur in the local elections this system, should exclude the application of Article 119 and Article 123 Paragraph (3) of the Act ASN against civil servants who follow Election through independent candidates. The second article of Law ASN has carried out testing of the legislation on the Constitutional Court. Constitutional Court through the PMK Number 41/PUU-XII/2014, does not invalidate the enforceability of both articles simply change the time of resignation of civil servants when, following the election.

Based on the above, this legal research approach law, the approach of the case and the historical approach. Thesis is focused to determine the legal considerations analysis or consideration of the judge in the PMK Number 41/PUU-XII/2014. The final goal of the analysis of the judge's decision were to assess the losses that will result from the application of the second article of Law ASN against most of their rights so that they can be reviewed on the legal protection that should be given to the professionalism of civil servants who follow the election by independent candidate.

The conclusion that the analysis of the legal considerations judges regarding the obligation resignation of civil servants who follow the election without the mechanism of political parties has caused discrimination. Legal protection of the rights of civil servants who follow the election by independent candidate shall be given by the state because he did not violate the rules that have been set, because it is for civil servants should only be suspended from the profession or be given unpaid leave the country.

**Keywords:** *Legal Protection, Civil Servants, Election, Independent Candidate.*